

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **A. Tinjauan Umum Tentang Jalan**

### **1. Jalan**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan bangunan pelengkapan dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan air, serta diatas permukaan air, kecuali jalam kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>23</sup> Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha perorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagian nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

### **2. Pengelompokkan Jalan**

#### **a. Menurut Sistemnya**

##### **1. Sistem jaringan jalan primer**

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranana pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sistem jaringan primer sebagaimana dimaksud

<sup>23</sup> Gunardo, *Geografi Transportasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berujud pusat-pusat kegiatan.

**2. Sistem jaringan sekunder**

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.

**b. Menurut fungsinya**

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam:

1. Jalan arteri: merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatannya rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Menurut statusnya**

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kefiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada didalam kota.

**d. Menurut kelasnya**

Untuk mengatur penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan elas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jalan bebas raya
2. Jalan raya
3. Jalan sedang
4. Jalan kecil

Jalan umum menurut lasifikasi berdasarkan kelas jalan menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang prasaranan dan sarana lalu lintas jalan terdapat pada pasal 11, yaitu:

- a. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terbeberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton.
- c. Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk uatan dengan ukuran lebar lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan terberat yang diizinkan 8 ton.
- d. Jalan kelas IIIB, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendwraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2. 500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter (2.1 meter), ukuran panjang tidak melebihi tidak melebihi 9.000 milimeter (9 meter), dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.<sup>24</sup>

### 3. Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaa, pemnbangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya:

- a. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
- b. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
- c. Pembangunan jalan adalah kegiatan perograman penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konrtuksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- d. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

---

<sup>24</sup> Pasal 11 Pp. no. 43 Tahun 1993

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4. Manfaat Jalan**

- a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, politik. Pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.
- b. Jalan sebagai distribusi barang, dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Jalan yang merupakan satu esatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### **5. Permasalahan Jalan**

Jalan selain menguntungkan juga selalu terkait dengan permasalahanya diantaranya:

- a. Pembangunan tidak sesuai dengan kondisi geografis, ekonomi, social dan budaya setempat.
- b. Kelancaraan lalu lintas angkutan jalan masih rendah terutama disebabkan oleh masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan, lemahnya manajemen lalu lintas, rendahnya ketertiban pengguna jalan, banyaknya kegiatan parker dan masyarakat yang menggunakan badan jalan, kerusakan jalan serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah armada lalu lintas dengan kapasitas jalan yang ada.
- c. Adanya penyalahgunaan dana dalam proyek pembangunan sehingga kualitas tidak optimal/

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perekembangan kapasitas jalan masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan, terutama di wilayah perkotaan dan beberapa jaringan jalan antar kota, seperti di lintas-lintas utama di jiwa dan sebagai lintas sumatera.
- e. Sering terjadi kecelakaan karena jalan rusak, ketidak disiplin pengguna jalan.
- f. Dijadikannya pinggir jalan sebagai tempat usaha.
- g. Pemerataan jalan tidak merata (Jawa Sentries)
- h. Diadakannya retribusi jalan yang illegal bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan.
- i. Tidak siapnya tiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal penenangan dan pemeliharaan jalan yang menjadi wewenang.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Alat Pembatasan Kecepatan (Apk) Polisi Tidur (*ROAD HUMPS*)**

### **1. Alat Pembatasan Kecepatan (APK) / Polisi Tidur (*Road Humps*)**

Jendulan melintang jalan (*road humps*) merupakan bagian dari alat pengendali pemakai jalan sebagai alat pembatasan kecepatan, dan memiliki banyak nama khususnya di Indonesia dikenal dengan polisi tidur (*sleeping policeman*). Polisi tidur sudah dicatat Abdul Chaer dalam Kamus Doim Bahasa Indonesia (1984) dan diberi makna “rintangan (berupa permukaan jalan yang ditinggalkan) untuk menghambat kecepatan kendaraan” dan mulai diakui KBBI Edisi Ketiga (2001).

<sup>25</sup>*Ibid.* h. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasilitas jendulan melintang jalan (*road humps*) ini merupakan adopsi dari *UK Departemen For Transportasi* untuk mengatasi permasalahan pelanggaran kecepatan yang mengakibatkan tingginya kecelakaan. Jendulan melintang jalan (*road humps*) adalah fasilitas yang dirancang dalam bentuk gangguan geometrik vertikal untuk memberikan efek paksaan bagi pengemudi menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna lahan yang kurang menguntungkan, sampai 40%.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pemakaian Jalan disebutkan peraturan tentang Alat Pembatasan Kecepatan (APK) / Polisi tidur bahwa:

**Pasal 3**

1. Alat Pembatasan Kecepatan (APK) adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.
2. Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu.

**Pasal 4**

1. Alat Pembatasan Kecepatan ditempatkan pada:
  - a. Jalan dilingkungan pemukiman.
  - b. Jalan lokal yang mempunyai kelas III C.
  - c. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
3. Lokasi dan pengulangan penempatan Alat Pembatasan Kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**Pasal 5**

1. Penempatan Alat Pembatasan Kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dalam lampiran 1 Tabel 1 No. 6b Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di jalan.
2. Penempatan Alat Pembatasan Kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
3. Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagian dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk member peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya Alat Pembatasan kecepatan didepannya.

**Pasal 6**

1. Bentuk penampang melintang Alat Pembatasan Kecepatan menyerupai trapezium dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 12 cm.
2. Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol diatas badan jalan dan minimum 15 cm.
4. Bentuk dan ukuran Alat Pembatasan Kecepatan sebagaimana dalam Lampiran gambar 1 keputusan ini.

**Pasal 7**

1. Alat Pembatasan Kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badab jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.
2. Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

Alat Pembatas Kecepatan (APK) / Polisi tidur memperhatikan beberapa hal seperti:

- a. Pelaksanaan fasilitas ini terbukti sangat efektif menurunkan kecepatan.
- b. Fasilitas ini tidak menimbulkan kebisingan sehingga dapat dilaksanakan didaerah pemukiman.
- c. Fasilitas ini harus dirancang dan dilaksanakan sesuai standar yang disyaratkan karena bila tidak justru dapat menciptakan potensi kecelakaan lali lintas atau kerusakan kendaraan.
- d. Perlu diberikan rambu dan fasilitas pendukung lain untu meningkatkan efektifitas fasilitas.

Bentuk penampang melintang alat pembatasan kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm, dengan kelandaian sisi miringnya maksimal 15%.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebar datar pada bagian sisi miringnya. Proporsional dengan bagian menonjol diatas badan jalan dan minimum 15 cm. Material alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa sebagaimana juga harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

**Pasal 39**

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Teknis menyebutkan bahwa:

1. Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan. Dalam pasal 1 menyebutkan Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Penentuan persyaratan teknis alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
  - b. Penentuan petunjuk teknis, meliputi penetapan, pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
3. Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
  - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis-Jenis Alat Pembatasan Kecepatan (APK) / Polisi Tidur (*Road Humps*)

### a. Speed Bump

*Speed Bump* pada umumnya mempunyai ukuran dengan tinggi 7,5 cm sampai 15 cm dan lebar 30 cm sampai 90 cm. Pemasangan *speed bump* yang cenderung tidak nyaman bagi pengendara namun pada umumnya mampu mengurangi kecepatan kendaraan menjadi + 8 km/jam.

*Speed Bump* mampu mengurangi kecepatan kendaraan yang melewatinya karena ukuran umum dari *speed bump* yang cenderung menghasilkan beban kejutan yang lebih besar dari beban kejutan yang dihasilkan oleh bentuk polisi tidur lainnya.

### b. Speed Tables

*Speed tables* dikenal dengan *flat-topped speed humps*, dan memiliki susunan material berupa aspal ataupun beton. *Speed tables* juga dikenal dengan *trapezoidal humps* atau *speed platforms*. Jika ditandai dengan *zebra cross*, *speed tables* bisa juga dinamakan *raised crosswalks* atau *raised crossings*.

*Speed tables* umumnya mempunyai ukuran tinggi dari 76 mm sampai 90 mm (3 – 3,5 inch) dengan panjang sekitar 6,7 m (22 ft) dan *speed tables* umumnya terdiri dari 3,1 m (10 ft) bagian datar dan 1,8 m (6 ft) bagian miring di kedua sisi yang bisa berbentuk lurus, parabolik, atau profil sinusoidal. Secara umum hasil pemantauan kecepatan rata-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata berkisar antara 40-48 km/jam (25-30 mph) pada jalan tergantung pada jarak antar *speed tables*.

c. Speed Humps

*Speed humps* umumnya ukuran dan tinggi 7,5 cm sampai 10 cm dan lebar 3,6 m. Pemasangan *speed humps* dapat mengurangi kecepatan kendaraan yang melewati yaitu antara 24 km/jam (20 mph) sampai 40 km/jam (25 mph). Dalam *Neighborhood Traffic Safety Program, Departement Of Public Works and Transportation* Tahun 1995 Tentang *Guidelines For Speed Humps Program* menjelaskan bahwa *speed hump* tidak ditempatkan pada jalan dengan aktivitas perjalanan yang tinggi (*driveway*) atau dalam suatu perpotongan jalan dan juga tidak ditempatkan 76,2 m (250 ft) dari rambu lalu lintas atau 15,1 m (50 ft) dari suatu perpotongan jalan.

d. Pita Penganduh (*Rumble Stips*)

Pita penganduh (*Rumble Strips*) memiliki bentuk seperti polisi tidur namun tidak dirancang untuk mengaruhi kecepatan lalu lintas akan tetapi dirancang untuk memberikan efek getaran mekanik maupun suara, dan pada prakteknya fasilitas ini efektif digunakan pada jalan antar kota, dengan maksud untuk meningkatkan daya konsentrasi pengemudi sehingga akan meningkatkan daya antisipasi, reaksi, dan perilaku.

Dimensi pita penganduh *Rumble Strips* adalah sesuai dengan persyaratan spesifikasinya yakni lebar berkisar antara 10 cm sampai 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cm dan tinggi berkisar antara 8 mm sampai 15 mm dengan panjang yang disesuaikan dengan lebar melintang jalan.

Pengaturan jarak optimal untuk pemasangan pita penganduh (*Rumble Stips*) yaitu sebelum tempat penyeberangan pejalan kaki dan untuk menempatkan pita penganduh (*Rumble Stips*) pada jarak 7 kali batas kecepatan sebelum penyeberangan. Dengan demikian untuk batas kecepatan 72 km/jam (45 mph) ditempatkan sekitar 96 m sebelum tempat penyeberangan pejalan kaki.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan. Pengertian atau definisi tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.<sup>26</sup>

Suyanto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>27</sup>

Siagan mendefinisikan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

<sup>26</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 27

<sup>27</sup>Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tingkat evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat dilamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Dein* (kenyataan).

Selanjutnya Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawaai;
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusun evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Syarat-Syarat Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan diakhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan baik. Syarat itu adalah.

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan

Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomanya pun berbeda.

- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.

- c. Pengawasan harus melihat jauh kedepan

Untuk membuat situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting

Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama akan mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.

- e. Pengawasam harus subjektif

Supaya pengawasan dapat lebih objektif maka didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.

<sup>29</sup>Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengawasan harus fleksibel

Keluasan bisa diberi dengan memasukkan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan.

g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi

Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.

h. Pengawasan harus ekonomis

Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.

i. Pengawasan harus dipahami

Jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak ekurangan saja.

j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi

Suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut sujanto adalah : untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>31</sup> Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.

Menurut Victor M. Manulag dan Jusuf Juhir, tujuan pengawasan yaitu:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Arifin Abdul Rachman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan

---

<sup>31</sup> Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011), h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, sehingga mendapat efisien yang lebih besar.<sup>32</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli diatas pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

#### 4. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan diuraikan pada pembahasan dibawah ini.<sup>33</sup>

##### a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

##### 1. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

##### 2. Pemeriksaan Financial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan ) antara

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, h. 18

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang peraturan, kepastian, intruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3. Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan.

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

2. Pengawasan Reprensif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis Pengawasan Berdasarkan Subjek Yang Melakukan Pengawasan.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pemimpin terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.

3. Pengawasan Legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik dipusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

4. Pengawasan Masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang temuat didalam media massa atau elektronik.

5. Pengawasan Politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d. Jenis Pengawasan Berdasarkan Cara Pelaksanaanya:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pebgawas legislatif, pengawas masyarakat.

e. Jenis Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan:

1. Sebelum Kegiatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunuj operasional.

**2. Selama Kegiatan**

Pengawasan Yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat refresif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

**3. Sesudah Kegiatan**

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semua telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini mengoreksi atas esalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat reprensif.

**f. Dari sisi objek yang diawasi:**

**1. Pengawasan Khusus**

Pengawasan Khusu adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contihnya adala BPK hanya melakukan pengawsan terhadap anggaran biaya negara.

**2. Pengawasan Umum**

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal

melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan menteri tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum Kewenangan Menteri Perhubungan**

Kewenangan, tugas dan fungsi menteri perhubungan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (disingkat UU No.39 Tahun 2008). Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2008 memberikan pengertian atas kementerian Negara sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan menteri Negara adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008, Menteri Perhubungan membidangi urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Berdasarkan pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian perhubungan yang melaksanakan urusan dibidang perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengawasan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya;
2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya

<sup>34</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaa bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
5. Pelaksaaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 321 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, tufas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (disingkat perpres No. 24 Tahun 2010), Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang perhubungan dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 tersebut, kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian Perhubungan;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian perhubungan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian Perhubungan di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Berdasarkan dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014, Kementerian Perhubungan merupakan salah satu dari instansi Pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No. 22



Tahun 2009 menyatakan bahawa urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tidak lain adalah Kementerian Perhubungan.<sup>35</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>35</sup>*Ibid.* h. 199